PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MANFAAT PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

(Studi Empiris Pada SKPD Kota Bukittinggi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

OLEH:

SEPRIMA ARDE NINGSIH

02190/2008

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MANFAAT PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi)

Nama	:	Seprima Arde Ningsih
BP/NIM	:	2008/02190
Program Studi	:	Akuntansi
Keahlian	:	Sektor Publik
Fakultas	:	Ekonomi

Padang, Juli 2012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	Herlina Helmy, SE, M.S, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003	NIP. 19800327 200501 2 002

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH KOMPETENSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP MANFAAT PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris pada SKPD Kota Bukittinggi)

Nama	**: Seprima Arde Ningsih**
BP/NIM	**: 2008/02190**
Program Studi	**: Akuntansi**
Keahlian	**: Sektor Publik**
Fakultas	**: Ekonomi**

Padang, Juli 2012

Tim Penguji

	Nama	**Tanda Tangan**
1. **Ketua**	**: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**	
2. **Sekretaris**	**: Herlina Helmy, SE, M.s, Ak**	
3. **Anggota**	**: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**	
4. **Anggota**	**: Lili Anita, SE, M.Si, Ak**	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Seprima Arde Ningsih
Nim/Thn. Masuk	: 02190/2008
Tempat/Tgl. Lahir	: Padang Luar /18 September 1990
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Jalan Cendrawasih gang merpati no 5A ATB Padang
No.Telepon	: 082388658896
Judul Skripsi	:Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan , rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 04 Agustus 2012

Yang menyatakan,

Seprima Arde Ningsih

Nim. 02190

ABSTRAK

Seprima Arde Ningsih : Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD Kota Bukittinggi.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

II : Herlina Helmy, SE, M.S, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) Pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. (2) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara *total sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staf Subbagian Penatausahaan Keuangan. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 15 .

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,313 > 1,6657 (sig 0,024 < α 0,05) yang berarti H_1 diterima, dan 2) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan stndar akuntansi pemerintah dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,281 > 1,6657 (sig 0,025 < α 0,05) yang berarti H_2 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disertai dengan penelitian kualitatif dan pergantian sampel penelitian, serta dilakukan perubahan dalam pemilihan alternatif jawaban pada kuesioner penelitian.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, pujian yang jauh lebih baik dari apapun yng dapat penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah".** Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari, skripsi ini bukanlah semata-mata atas kemampuan sendiri, tapi atas bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada bapak Fefri Indra Arza, S.E, M.Sc. Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Herlina Helmy, S.E, M.S, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Teristimewa buat Ibu, Kakak dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2008 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya atas bantuan, petunjuk, arahan, bimbingan motivasi dan kerja sama dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia penelitian dan akademis. Amin.

Padang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Pembatasan Masalah 11

D. Perumusan Masalah 11

E. Tujuan Penelitian 11

F. Manfaat Penelitian 12

BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS 13

A. Kajian Teori

1. Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 13

2. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan 32

3. Pemanfaatan teknologi Informasi 34

B. Penelitian Relevan..... 37

C. Pengembangan Hipotesis 38

D. Kerangka Konseptual 42

E. Hipotesis 44

BAB III. METODE PENELITIAN 45

A. Jenis Penelitian..... 45

B. Populasi dan Sampel 45

C. Jenis dan Sumber Data..... 47

D. Teknik pengumpulan Data 47

E. Variabel Penelitian..... 48

F. Pengukuran Variabel..... 48

G. Instrumen Penelitian..... 49

H. Uji Validitas dan Reliabilitas 50

I. Hasil Uji Coba Instrumen..... 51

J. Uji Asumsi Klasik 52

K. Teknik Analisis Data..... 53

L. Definisi Operasional..... 57

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 59

B. Demografi Responden..... 60

C. Deskripsi Variabel Penelitian..... 64

D. Statistik Deskriptif 68

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 70

F. Uji Asumsi Klasik 71

G. Hasil Penelitian 74

H. Pembahasan 79

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Daftar SKPD 46

2. Skala Pengukuran 49

3. Nilai *Cronbach's Alpha* & *Corrected Item Total Correlation*..... 52

4. Tingkat Pengembalian Kuesioner 58

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 60

6. Karakteristik Responden Berdasarkan latar belakang pendididikan 61

7. Karakteristik Responden Berdasarkan keahlian yang di tempuh 62

8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja..... 62

9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..... 63

10. Distribusi Frekuensi Variabel manfaat Penerapan SAP..... 64

11. Distribusi Frekuensi Variabel Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan..... 66

12. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi..... 67

13. Statistik Deskriptif..... 69

14. Nilai *Corrected Item Total Correlation* Terkecil 70

15. Nilai *Cronbach's Alpha* Penelitian 71

16. Uji Normalitas..... 72

17. Uji Multikolinearitas 73

18. Uji Heterokedastisitas 74

19. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 74

20. Koefisien Regresi 75

21. Uji F Hitung 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Konseptual 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan mengisi kusioner 88
2. Kusioner Penelitian 89
3. Hasil analisis validitas dan Reliabilitas pilot test 92
4. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas penelitian 95
5. Statistik Deskriptif 97
6. Uji Asumsi Klasik 98
7. Uji Hipotesis 99
8. Tabel Distribusi Frekuensi Skor variabel 100

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance)* pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas tersebut adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang mengikuti Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang–Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Harus disadari banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini maka diharapkan laporan keuangan tersebut mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh para pemakainya. Tanpa adanya standar ini, maka laporan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat maupun daerah bisa jadi berbeda - beda yang pada gilirannya akan memunculkan

persoalan baru pada level nasional. Oleh karena itu, setiap entitas pelaporan diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP yang berlaku umum.

Sesuai dengan amanat Undang - Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward acrual)* yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun, SAP berbasis kas menuju akrual ini tidak mampu menyajikan secara tepat jumlah penggunaan biaya total sumber daya (full cost) yang digunakan, seperti : Pembelian aset yang bernilai besar akan sangat membebani pembiayaan pada tahun pembelian aset tersebut dibayar, tetapi tidak diakui dalam bentuk biaya atas penggunaan aset tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, tidak dilakukan pencatatan dan pengakuan terhadap komitmen pembayaran di masa yang akan datang. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut hanya bersifat sementara dan sejak tanggal 22 Oktober 2010 telah digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu

pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Nordiawan, 2008).

Secara konseptual, SAP berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. SAP berbasis akrual mampu mendukung terlaksanakannya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Dengan memasukkan seluruh beban, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Dalam rangka pengukuran kinerja, informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, SAP berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Simanjuntak, 2010).

Secara lebih mendalam, Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi

pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Menurut (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2006) Penerapan SAP berbasis akrual memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia dan harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur mengingat SAP berbasis kas menuju akrual saja belum mampu dipahami sepenuhnya oleh pelaksana akuntansi dan sekarang sudah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual. Permasalahan penerapan SAP berbasis akrual bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting

adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006).

Sejalan dengan itu menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan, 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur pemerintahan daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang berlaku agar bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu, maka pihak penyedia informasi dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam proses pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pengetahuan yang memadai oleh para pelaksana akuntansi, maka akan berdampak positif dalam proses pencatatan yang sesuai dengan SAP yang

berlaku sehingga dapat menjadi pedoman oleh pengguna laporan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Dalam pengimplementasian SAP berbasis Akrual, yang tak kalah pentingnya, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi, khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual di dalamnya agar implementasi basis akrual ini dapat sesuai harapan.

Dengan diberlakukannya SAP berbasis akrual maka perubahan yang cukup signifikan dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan adalah tersajinya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan demikian transaksi akuntansi akan semakin rumit dan kompleks. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks.

Menurut Sugijanto (dalam Harifan 2009), Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto, 2001). Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah.

Kendala pemanfaatan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap pengimplementasian SAP pada pemerintahan Pusat maupun Daerah.

Penelitian Zetra (2009) yang dilakukan di 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat pada tahun 2008 dan 2009, ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf

terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2010 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kota Bukittinggi mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti, tidak ada peningkatan opini dari tahun 2008 sampai 2010. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya yaitu karena penyusunan LKPD tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku, kualitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi. LKPD yang terus memburuk menggambarkan bahwa pemerintahan daerah kota Bukittinggi belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sepenuhnya dalam penyajian laporan keuangan (Bukittinggi Haluan 16 Oktober 2011*).*

Perubahan pencatatan dari *single entry* menjadi *double entry* dan sistem yang berbasis akrual telah menjadi permasalahan baru pada instansi pemeritah. Sistem *single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaan. Namun seiring dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas, sistem ini tidak lagi dapat digunakan karena tidak mampu mencerminkan keadaan dan posisi keuangan yang sebenarnya. Perubahan sistem ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaporan keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah, karena masing-masing SKPD belum mampu menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman sebagian besar pegawai terhadap penerapan SAP yang baru sangat kurang. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sulitnya bagi SKPD untuk mampu menerapkan SAP sepenuhnya dalam menyampaikan laporan keuangan .

Adapun penelitian mengenai pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan SAP telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Citra (2011) dengan judul ” Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SAP pada Pemerintahan kota Binjai”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas). Disamping itu, pemahaman sebagian besar pegawai terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baru sangat kurang, dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik belum dilaksanakan.

Sementara itu dari penelitian yang dilakukan Fardila (2008), tentang penerapan SAP Kota Padang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini

dapat dilihat dari banyaknya instansi-instansi yang terdapat di Kota Padang yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya. Kendala dalam pelaporan keuangan ini salah satunya adalah keterbatasan dari sumber daya manusia dibidang keuangan yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi sehingga memiliki kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yaitu manfaat penerapan SAP berbasis akrual dan penambahan variabel baru yaitu pemanfaatan teknologi informasi serta tempat penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap mannfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD kota Bukittinggi)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain:

1. Seberapa besar kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
2. Seberapa besar Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
3. Seberapa besar Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?

4. Apakah penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan kota Bukittinggi sudah sesuai dengan SAP yang berlaku?

C. Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarahnya penelitian ini, maka peneliti akan membatasi masalah pada pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

D. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan terhadap manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah?
2. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Bagi Akademik, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik yang berhubungan dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan Akademik.
3. Bagi Sektor Publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku di Pemerintah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut PP No 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami informasi yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor, khususnya eksternal auditor, SAP digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang disajikan. Dengan demikaian, Standar Akuntansi Pemerintah menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2006).

Sesuai dengan amanat Undang – Undang No 17 Tahun 2003 pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun anggaran 2008. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam

laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Nordiawan, 2008).

b. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

1) PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan standar penyajian laporan keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2) PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

1. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan

3. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/defisit-LRA;
5. Penerimaan pembiayaan;
6. Pengeluaran pembiayaan;
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

3) PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas

dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

4) PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5) PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Standar ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara/daerah. Pernyataan Standar ini tidak mengatur : Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan dan Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa: 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

6) PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan Standar ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah pusat dan daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
3. Berisiko rendah.

7) PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

8) PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:

1. Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
2. penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
3. penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya

memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

9) PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di

masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
2. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
4. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

10) PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

11) PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian

besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

1. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
2. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
3. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah Pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik

(reciprocal accounts) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

12) PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Tujuan PSAP 12 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

c. Komponen Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

3. Neraca

Dengan adanya penambahan akun dalam Neraca, dimana sebelumnya dalam SAP berbasis kas menuju akrual informasi tentang piutang serta kewajiban kurang informatif, maka sekarang dalam Neraca SAP basis akrual maka setiap transaksi ekonomi, baik itu pengeluaran maupun penerimaan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian seluruh transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah baik secara kas atau kredit akan dapat diketahui, hal ini akan menghasilkan informasi tentang jumlah piutang serta kewajiban pemerintah atas transaksi tersebut. Dampaknya adalah adanya informasi tentang piutang maka penyajian asset dalam neraca lebih akurat, selain itu dengan adanya penyajian jumlah kewajiban pemerintah yang lebih akurat membantu manajemen utang pemerintah dalam mengelola utang pemerintah.

4. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk

setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

5. Laporan Operasional

menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah seperti pendapatan, beban, dan transfer dalam satu periode laporan. Dengan adanya laporan Operasional tersebut maka masyarakat dapat melihat kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara dalam setiap tahun pelaporan, dimana meskipun setiap transaksi pemerintah akan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, namun baik jumlah beban atau pendapatan yang diterima atau dibayarkan oleh pemerintah akan disesuaikan sebesar jumlah yang telah menjadi beban atau pendapatan dalam periode laporan, hal ini akan membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan adanya Laporan Perubahan Ekuitas akan menggambarkan jumlah ketersediaan dana pemerintah pada akhir periode laporan. Dengan adanya ketiga hal tersebut akan membantu masyarakat yang diwakili oleh DPR guna melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap

rencana-rencana serta langkah-langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah. Jadi secara keseluruhan SAP berbasis akrual merupakan salah satu bentuk perwujudan dari good governance yang diterjemahkan dalam bidang keuangan negara sebagai bentuk pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2006) secara umum penerapan akuntansi berbasis akrual akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Manfaat dari penerapan SAP basis akrual ini adalah untuk menilai :

a) Akuntabilitas

Dengan penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Transparansi

Dengan penerapan SAP berbasis akrual, informasi yang dihasilkan lebih terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

e) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Sedangkan Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono (2004) kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

Prinsip-prinsip akuntansi harus diketahui oleh seorang akuntan atau pelaksana akuntansi pada suatu entitas, seperti yang dikatakan oleh Soemarso (2002) sebagai berikut:

> Efektifitas pelaksana akuntansi akan bertambah, bila mereka mengetahui prinsip-prinsip akuntansi. Setiap orang yang terjun dalam kegiatan perusahaan dari pekerja yang paling rendah sampai pada manajemen dan pemilik, selalu berhubungan dengan akuntansi.

> Makin tinggi tingkat wewenang dan tanggung jawab seseorang dalam struktur organisasi perusahaan, makin banyak konsep-konsep dan istilah-sitilah akuntansi yang harus diketahui.

Terlihat bahwa terdapat hubungan yang erat antara keahlian (skill) dan kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kinerja pekerjaannya. Oleh karena itu pimpinan harus menyesuaikan kemampuan dan keahlian pekerja dengan bidang pekerjaannya, karena keberhasilan dan kinerja dari seseorang itu sangat bergantung pada spesifikasi ilmu dan keahlian yang dimilikinya.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki staf akuntansi (PPK-SKPD) yang berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, staf yang berkompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan staf akuntansi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, dalam Dita.2008)

Menurut Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan. 2009), kapasitas sumber daya manusia adalah merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi akuntansi atau kewenangannya untuk mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien. Kemampuan dalam melaksanakan fungsi ini terdiri dari, yaitu:

a. Bagian keuangan memiliki staff yang berkualifikasi dalam jumlah yang cukup.
b. Minimal staf subbagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi.
c. Memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas dalam melaksanakan tugas.
d. Peran dan tanggung jawab ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.
e. Uraian tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.
f. Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.
g. Telah melaksanakan proses akuntansi
h. Memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.
i. Dilakukannya pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan, dan pengembangan keahlian dalam tugas.
j. Adanya dana yang dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a) Komponen Teknologi Informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et*

al., 2000 dalam Arfianti, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Hamzah, 2009 dalam Winidyaningrum, 2010) :

a. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan
b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer se-bagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu me-lakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003).

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas. Data mungkin di-kumpulkan dengan peralatan

khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak.

Yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson *et al.*, 2000 dalam Arfianti, 2011):

1) pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2) keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,
3) kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4) penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu,
5) tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6) pilihan pemasukan data dan penyediaan *output* lebih luas/banyak, dan
7) produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, pe-rencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian *hardware* yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

b. Tingkat Integrasi Teknologi Informasi

Menurut Jurnali dan Supomo (2002) dalam Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1) Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
2) Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
3) Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
4) Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
5) Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6) Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegrasi
7) Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
8) Peralatan yang usang atau rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya

B. Penelitian Relevan

Penelitian Fardila (2008) yang meneliti tentang penerapan SAP dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP. Hal ini dapat dilihat dari

banyaknya dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan pada periode pelaporannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang adalah pelaksana akuntansi yang bukan dari latar belakang akuntansi, sistem informasi belum lengkap karena keterbatasan fasilitas penunjang, serta kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang.

Penelitian Sulani (2009) mengenai "Faktor – faktor Pendukung keberhasilan Penerapan PP No 24 Tahun 2005 pada Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen dan perangkat pendukung secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No 24 Tahun 2005.

Penelitian Indah (2008) tentang "Pengaruh Sumber daya Manusia dan Perangkat Pendukung terhadap Keberhasilan Penerapan PP No 24 Tahun 2005" studi empiris pada pemerintahan kota medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber daya manusia dan perangkat pendukung memilki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan PP No 24 Tahun 2005.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan terhadap manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005 dalam Indriasari 2008). Kompetensi

dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban, 2001(dalam Harifan 2009) pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan SKPD. Pencatatan dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Proses pencatatan tersebut harus berdasarkan pada SAP yang berlaku, karena dengan berpedoman pada standar yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan akan dapat membantu pengguna laporan untuk mengambil keputusan yang tepat.

Agar laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, maka pelaksana akuntansi yang dalam hal ini adalah PPK-SKPD harus memiliki pengetahuan dibidang akuntansi. Dengan adanya pengetahuan di bidang akuntansi, maka pelaksana akuntansi tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Fardila (2008), tentang penerapan SAP Kota Padang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kendalanya adalah keterbatasan dari sumber daya manusia dibidang keuangan yang bukan berasal dari latar belakang akuntansi sehingga memiliki kesulitan dalam memahami pencatatan dan siklus akuntansi serta Standar Akuntansi Pemerintah yang berterima umum.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengetahuan pelaksana akuntansi dalam bidang akuntansi akan berdampak positif dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga akan bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Jogiyanto (1995) Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna TI dalam melaksanakan tugasnya. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi telah menggantikan teknologi manual dengan melakukan pemrosesan atas data yang jumlahnya sangat besar, ataupun menjalankan pekerjaan yang sangat kompleks. Komputer juga dapat bekerja sangat konsisten serta reliabel dalam waktu yang lebih cepat bila dibanding dengan kemampuan manusia.

Dengan diberlakukannya SAP berbasis akrual, maka perubahan yang cukup signifikan dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan adalah tersajinya Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dengan demikian transaksi akuntansi akan semakin rumit dan kompleks. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks.

Menurut Sugijanto (dalam Harifan 2009), Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Kendala pemanfaatan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh terhadap pengimplementasian SAP pada pemerintahan Pusat maupun Daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa diperolehnya manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dipengaruhi oleh pemanfaatan Teknologi Informasi karena dengan semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi pada setiap SKPD maka akan mambantu SKPD untuk dapat menerapkan SAP berbasis akrual ini sepenuhnya dalam menyelesaikan laporan keuangannya sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan menggunakan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Dengan ditetapkanya PP No. 71 Tahun 2010 maka Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Penerapan SAP berbasis akrual bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas.

Untuk dapat menerapkan SAP berbasis akrual ini sepenuhnya, maka pelaksana akuntansi dalam suatu instansi harus memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Selain itu sumber daya manusia juga didukung oleh latar belakang pendidikan, pemahaman dan pelatihan yang dibutuhkan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi ini, sumber daya manusia (SDM) tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual di pandang lebih rumit dan kompleks dibanding SAP kas menuju akrual, maka untuk memudahkan pekerjaanya dibutuhkan teknologi informasi yang memadai untuk menjalankannya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain itu, Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dengan semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi pada Instansi pemerintah maka akan mambantu SKPD untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Hubungan antara kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai variabel independen dan manfaat penerapan SAP sebagai variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam model penelitian berikut ini :

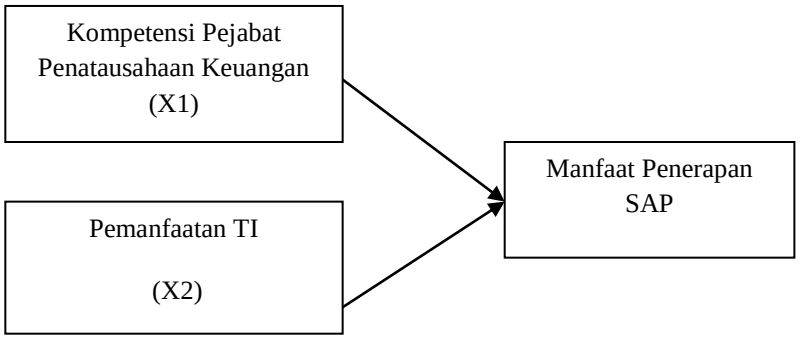

Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

H_1 : Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan SAP.

H_2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan SAP.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap manfaat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

B. Keterbatasan dan saran penelitian

Meskipun penelitian ini telah dirancang dan direncanakan semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi penelitian selanjutnya antara lain:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 21,2%. Sedangkan 78,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Kuisioner yang peneliti sebarkan masih terdapat keterbatasan , karena pernyataan dalam kuisioner hanya menggunakan pernyataan positif saja.

Sehingga menyebabkan responden diarahkan untuk pilihan jawaban yang baik atau positif saja.

3. Alternatif jawaban yang peneliti gunakan kurang tepat, sehingga tidak mampu mengungkapkan semua hal yang akan diteliti.

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Penelitian ini masih terbatas pada kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap manfaat penerapan standar akuntansi pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap manfaat penerapan SAP. Seperti : komitmen dari pimpinan dan resistensi terhadap perubahan.
2. Untuk penelitian selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisioner dimodifikasi dengan pernyatan negatif dan juga gunakan alternatif jawaban yang lebih tepat, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.